



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE  
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR RANCANGAN QANUN PROGRAM  
LEGISLASI KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang :
- a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe mempunyai kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang diwujudkan dalam bentuk fungsi legislasi;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun, Perencanaan Pembentukan Qanun Kabupaten/Kota dilakukan dalam Program Legislasi Kota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun;
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Periode 2019-2024;
11. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Masa Sidang I-III Tahun 2023-2024;

Memperhatikan : Surat Pj. Wali Kota Lhokseumawe Nomor : 180/4485 Tanggal 27 Desember 2023 tentang Penyampaian Usulan Daftar Rancangan Qanun Priotitas Program Legislasi (Proleg) Kota Lhokseumawe Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Daftar Rancangan Qanun Program Legislasi Kota Lhokseumawe Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Daftar Rancangan Qanun sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, dalam pembahasannya Panitia Legislasi melakukan prioritas dengan memperhatikan aspek dinamika dan urgensitasnya;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2024;
- KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhokseumawe  
Pada tanggal 30 April 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KOTA LHOKSEUMAWE  
WAKIL KETUA,

T. SOFIANUS

DAFTAR RANCANGAN QANUN KOTA LHOKEUMAWE PRIORITAS TAHUN 2024  
PADA PROGRAM LEGISLASI KOTA LHOKEUMAWE

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		OPD	TARGET PENYAMPAIAN	KET
				UBAH	BARU		NASKAH AKADEMIK	PENJEJASAN ATAU KETERANGAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	QANUN	Perubahan Atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe	Penambahan Perangkat Daerah Kecamatan Kandang Makmur, Perubahan Nomenklatur DPMPSTP dan Naker menjadi DPMPSTP, Perubahan Nomenklatur Disperindagkop dan UKM dengan Penambahan Urusan Tenaga Kerja akibat pelepasan urusan di DPMPSTP dan Badan Kesbangpol dan Pemisahan OPD BPKD menjadi 2 (dua) OPD yaitu OPD Keuangan dan OPD Pendapatan.	√		<ol style="list-style-type: none"> <li>UU Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;</li> <li>UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;</li> <li>UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU;</li> <li>PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.</li> </ol>		√	BAGIAN ORGANISASI	2024	
2.	QANUN	Ketertiban Umum	Pengaturan tentang Ketertiban Umum		√	<ol style="list-style-type: none"> <li>UU Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;</li> <li>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;</li> <li>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU.</li> </ol>	√		SATPOL, PP DAN WH	2024	
3.	QANUN	Perlindungan Anak	Hak Anak, kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan keluarga serta perlindungan		√	<ol style="list-style-type: none"> <li>UU Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;</li> <li>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;</li> <li>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;</li> <li>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;</li> <li>UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU;</li> </ol>	√		BPKD dan DPP, PA, PP dan KB	2024	

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		OPD	TARGET PENYAMPAIAN	KET
				UBAH	BARU		NASKAH AKADEMIK	PENJEJASAN ATAU KETERANGAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	QANUN	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2045	Pengaturan Pembangunan Jangka Panjang		√	<ol style="list-style-type: none"> <li>UU Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;</li> <li>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;</li> <li>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;</li> <li>UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU;</li> <li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;</li> </ol>			BAPPEDA	2024	
5.	QANUN	Perusahaan Umum Daerah Air Minum Ie Beusaree Rata Kota Lhokseumawe	Perubahan Badan Hukum PDAM Ie Beusaree Rata Kota Lhokseumawe		√	<ol style="list-style-type: none"> <li>UU Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;</li> <li>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;</li> <li>UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;</li> <li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas dan Dewan Komisaris atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara;</li> </ol>			BAKIAN PEREKONOMIAN / PDAM Ie BEUSAREE RATA	2024	
6.	QANUN	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Mekanisme Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup		√	<ol style="list-style-type: none"> <li>UU Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;</li> <li>UU Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;</li> <li>UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi UU;</li> <li>Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;</li> </ol>	√		DLH	2024	

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		OPD	TARGET PENYAMPAIAN	KET
				UBAH	BARU		NASKAH AKADEMIK	PENJEJASAN ATAU KETERANGAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	QANUN	Majelis Pendidikan Daerah Aceh Kota Lhokseumawe	SOTK MPD Kota Lhokseumawe		√	<ol style="list-style-type: none"> <li>UU Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;</li> <li>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;</li> <li>UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UUnomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU;</li> <li>Qanun Adat Aceh Nomor 7 Tahun 2022 tentang Majelis Pendidikan Daerah</li> <li>Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2023 tentang Tata Tertib Penjaringan Dan Pennyaringan Serta Musyawarah Besar Majelis Pendidikan Aceh</li> </ol>	√		MPD	2024	
8.	QANUN	Kawasan Tanpa Asap Rokok	Pengaturan Penetapan Tempat Kawasan Tanpa Asap Rokok		√	<ol style="list-style-type: none"> <li>UU Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;</li> <li>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;</li> <li>UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU;</li> <li>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</li> <li>Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan</li> <li>Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kawasan Tanpa Rokok</li> </ol>			DISPORAPAR	2024	
9.	QANUN	Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2023	Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2023		√	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;</li> <li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ;</li> </ol>			BPKD	2024	
10.	QANUN	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2024	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2024	√		<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;</li> <li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;</li> </ol>			BPKD	2024	
11.	QANUN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2025	Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2025		√	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;</li> <li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah</li> </ol>			BPKD	2024	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KOTA LHOKEUMAWA  
WAKIL KETUA,

T. SOFIANUS